**ABSTRAK**

Alokasi Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai kebutuhan Desa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. Namun yang menjadi masalah sekarang ini adalah pembangunan fisik yang masih kurang serta pembangunan sumber daya manusia terutama masyarakat kampung untuk mengembangkan diri masih sangat rendah. Hal ini melatarbelakangi penulis untuk mengambil judul **“Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Kampung Di Kampung Sisir Distrik Kokas Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat”.**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Kampung serta menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan Alokasi Dana Kampung Di Kampung Sisir.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian eksploratif dengan pendekatan induktif. Penelitian yang dilakukakan bilamana peneliti belum memiliki pengetahuan atau gambaran yang jelas tentang situasi atau masalah apa yang terjadi. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis yaitu melalui wawancara (*interview*), observasi dan dokumentasi.

 Berdasarkan hasil penelitian, penulis mengambil kesimpulan bahwa Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Kampung sudah berjalan dengan baik dan lancar, tetapi masih belum maksimal. Dalam pelaksanaan kebijakan Alokasi Dana Kampung terdapat beberapa faktor-faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung yang mempengaruhi yaitu dukungan positif dari pihak pemerintah, sumber alokasi dana, transparansi yang baik dari aparat kampung dalam pengelolaan. Sedangkan faktor penghambat yaitu masih lemahnya pengalaman dan kemampuan aparat kampung dalam pengelolaan ADK, masih adanya ketergantungan dari pemerintah kampung kepada pemerintah kabupaten, dan kurangnya sarana dan prasarana. Adapun saran yang diberikan yaitu mengefektifkan implementasi Alokasi Dana Kampung dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pemerintah Daerah juga diharapkan untuk memberikan kegiatan pelatihan bagi aparat kampung tidak terkecuali untuk BAPERKAM mengenai manajeman pemerintahan kampung.

*Kata kunci : Implementasi kebijakan, alokasi dana kampung*

***ABSTRACT***

*Fund for village are funds derived from Local Budget (APBD) of Regency which was allocated in order to fund the needs of Villages, and, to conduct and implement the Government affairs as well as community service. But the problem showed that less physical development as well as human resources development mainly villagers to develop themselves were still very low. This reason made author took title* ***"Implementation of the policy on the allocation of funds in the village of Kampung Sisir District of Kokas Regency Fakfak Central Province of West Papua”.***

*The purpose of this research is to analyze the implementation of policy on the allocation of funds as well as kampung analyzing factors restricting implementation support and allocation policy of the Kampung Sisir.*

*In this study author uses exploratory research method with inductive approach. Research conducted when researches don’t have knowledge or a clear picture of the situation or problem what happened. Data collection techniques used by the author through the interview, observation and documentation.*

*Based on the results of the study, the authors concluded that the implementation of the policy on allocation of the funds already hometown goes well and smoothly, but not a maximum. In the implementation of the policy allocation kampung there are some supporting factors and the barrier. Supporting factors that affect positive support from the government, the source of the allocation of funds, greater transparency both from kampung apparaturs in the management. While the factors restricting that is still weak experience and ability in the management of kampung ADK apparatus, still the existence of dependency from government hometown to county government, and the lack of facilities and infrastructure. As for the advice given enables faster implementation of the allocation of the funds hometown with improving the quality of human resources. Local governments are also expected to provid training for officials of kampung is no exception to thegovernments management about the BAPERKAM village.*

*Keywords: Implementation of policies, allocation of village* funds